



PISAgro

THE FARM

Featured Agriculture Reportings Magazine

EDISI BULAN FEBRUARI 2023

FEBRUARY 2023 EDITION



Living Income as a Pillar for Measuring Smallholders' Welfare and Productivity

'Living Income' Sebagai Pilar untuk Mengukur Kesejahteraan dan Produktivitas Petani Kecil





PESAN DARI DIREKTUR KAMI

Rekan-rekan yang Terhormat,

Selamat datang di The FARM Edisi Februari 2023! Kesejahteraan petani menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi bangsa yang berkelanjutan, dan salah satu indikator pentingnya ialah *living income* atau pendapatan hidup.

Oleh karena itu, di buletin kali ini, kami akan membahas lebih dalam mengenai living income dan cara penghitungannya. Pada edisi kali ini, kami juga membahas tentang pengukuran living income petani Indonesia sebagai upaya untuk menunjang ketahanan pangan dan rantai pasok yang berkelanjutan.

Tak ketinggalan, kami juga mendapat kesempatan untuk melaksanakan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bersama perwakilan kelompok kerja Kakao, Sawit, dan Kopi, yang dimana audiensi ini membahas tentang pengembangan dan implementasi model kemitraan inklusif di Indonesia dan tantangan yang terjadi di lapangan, serta potensi kerjasama antarpihak di berbagai komoditas.

Akhir kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan kepada kami, sehingga Sekretariat PISAgro dapat terus menjalankan kegiatan kami. Selamat membaca The FARM edisi kali ini, dan semoga dapat menjadi sumber inspirasi baru bagi Anda.

Insan Syafaat

Direktur Eksekutif PISAgro



OPENING REMARKS

Dear Readers,

Welcome to The FARM February 2023 Edition! The welfare of farmers is the main pillar in the nation's sustainable economic development, and one of the important indicators is living income.

Therefore, in this newsletter, we will discuss deeper about living income and how to calculate the living income. In this edition, we also discuss measuring the living income of Indonesian farmers as an effort to support food security and a sustainable supply chain.

Not to forget, we also had the opportunity to hold an audience with the Directorate General of Plantation, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, together with representatives of the Cocoa, Palm and Coffee working group, in which this audience discussed the development and implementation of an inclusive partnership model in Indonesia and the challenges that occur in field, as well as the potential for cooperation between stakeholders in various commodities.

Finally, we also thank all parties for the support that has been given to us, so that the PISAgro Secretariat can continue to carry out our activities. Enjoy reading this edition of The FARM, and I hope it can become a new source of inspiration for you.

Insan Syafaat

Executive Director of PISAgro



THE FARM

DAFTAR ISI *TABLE OF CONTENTS*

■ Pesan dari Direktur Kami	I
■ <i>Opening Remarks</i>	II
■ Sorotan PISAgro 2.0	3
■ <i>PISAgro 2.0 Highlights</i>	6
■ Sorotan	9
■ <i>Highlights</i>	12
■ Warta Agro	15
■ <i>Agro News</i>	18
■ Fitur	21
■ <i>Feature</i>	24
■ Sajian Khusus	27
■ <i>Special Presentation</i>	30



CAPAIAN DASBOR PISAGRO 2.0 SAAT INI - FEBRUARI 2023

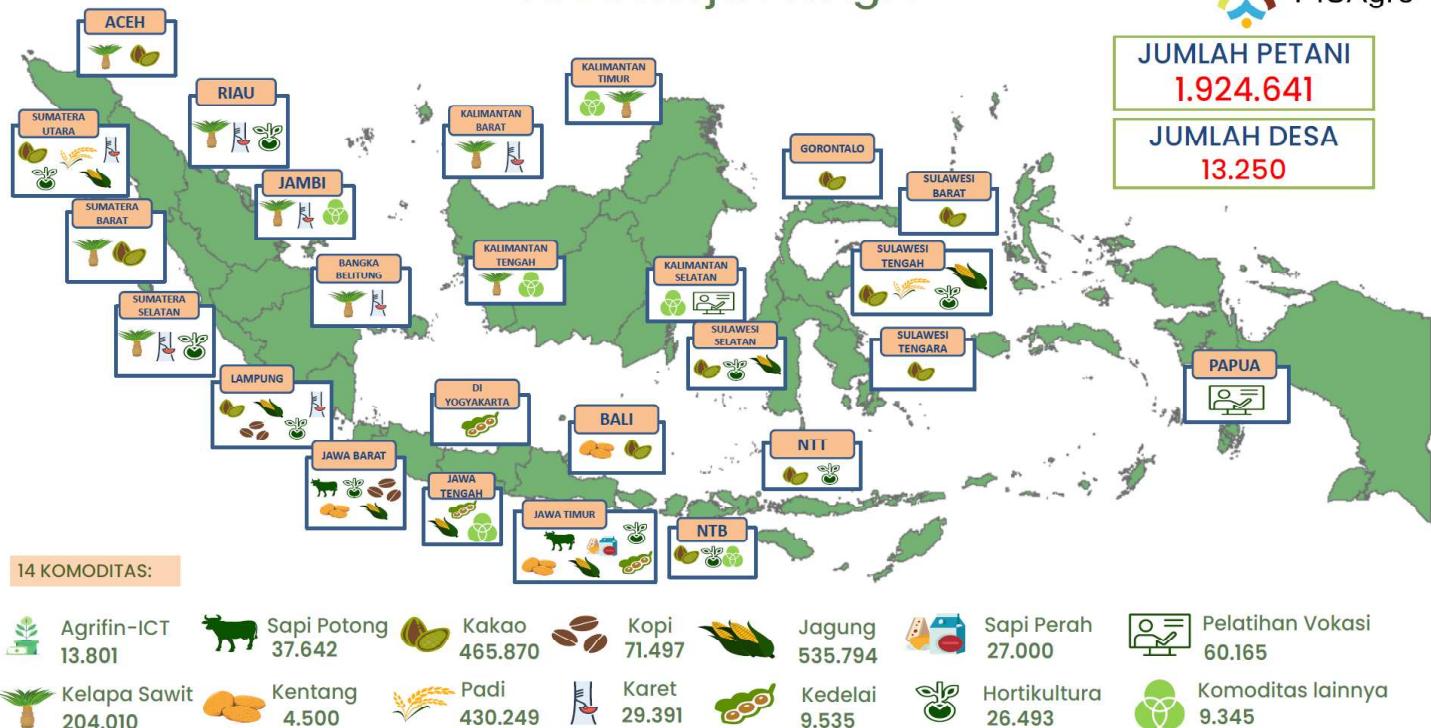
(Disusun oleh Fathan Oktrisaf, Hendri Surya Widcaksana, dan Sandra Pratiwi)

Area Kerja PISAgro



JUMLAH PETANI
1.924.641

JUMLAH DESA
13.250



PISAGRO 2.0 DASHBOARD



55
desa



18.077
petani



25.055
ha lahan

OVERVIEW



GROWTH

39% dari total petani memiliki **akses kepada bantuan finansial**
7.001 dari 17.010 (KUR, pinjaman, hibah)

77% dari total **hasil panen** petani dibeli langsung oleh perusahaan
(114.829 ton hasil panen)

23% dari total petani berpartisipasi dalam **lembaga koperasi**
4.096 dari 18.077

RESILIENCE

53%
29 dari 55



desa didukung oleh perusahaan dalam kualitas **ketahanan hidup**
setidaknya **2** fasilitas penunjang kesehatan petani beroperasi dan didukung oleh perusahaan di setiap desa

Jenis **aktivitas** yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan **kualitas kesehatan** petani:

29
kampanye

26 (dilakukan 1-2 kali dalam setahun)
sosialisasi

SUSTAINABILITY

58%
32 dari 55

desa didukung oleh perusahaan dalam implementasi **pertanian berkelanjutan**
48% dari total lahan kelapa sawit perusahaan berada di bawah **pengelolaan lahan berkelanjutan**

Jenis **aktivitas** yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung petani mengimplementasikan **manajemen limbah**:

52
kampanye

47
sosialisasi

54 (dilakukan 2-3 kali dalam setahun)
pelatihan

GROWTH

39%
7.001 dari 18.077

dari total petani memiliki **akses kepada bantuan finansial**
(KUR, pinjaman, hibah)

77%

dari total **hasil panen** petani **dibeli langsung oleh perusahaan**
(88.986 ton hasil panen)

23%
4.096 dari 18.077

dari total petani berpartisipasi dalam **lembaga koperasi**

31%

dari total petani berpartisipasi dalam **pelatihan praktik pertanian baik**
yang dilakukan oleh perusahaan
(dalam 2-3 kali setahun)

15%

5.147 dari 18.077
dari total petani telah mengimplementasikan **Praktik Pertanian yang baik**¹ dalam setiap proses produksinya

→ 3.266 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam **input-sourcing**

→ 3.026 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam **penanganan pasca-panen**

→ 3.185 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam operasi pertanian

Rata-rata pendapatan petani per bulan dari tiap komoditas:



4.200.000



2.500.000



5.000.000



3.500.000

¹ Praktik Pertanian Baik (PPB/GAP) adalah pedoman yang umum digunakan oleh petani untuk membantu upaya implementasi praktik pertanian berkelanjutan dan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk

RESILIENCE



² berdasarkan kondisi data check-up tahunan

SUSTAINABILITY



48%

7.472 dari 14.734 ha lahan

dari total lahan kelapa sawit perusahaan berada di bawah **pengelolaan lahan berkelanjutan**

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung petani dalam implementasi:

Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

25 kampanye	25 sosialisasi	23 pelatihan
-----------------------	--------------------------	------------------------

dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Manajemen Limbah

52 kampanye	47 sosialisasi	54 pelatihan
-----------------------	--------------------------	------------------------

dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Manajemen Biodiversitas

3 kampanye	2 sosialisasi	3 pelatihan
----------------------	-------------------------	-----------------------

dilakukan 1 kali setiap tahunnya

Manajemen Karbon dan Gas Rumah Kaca

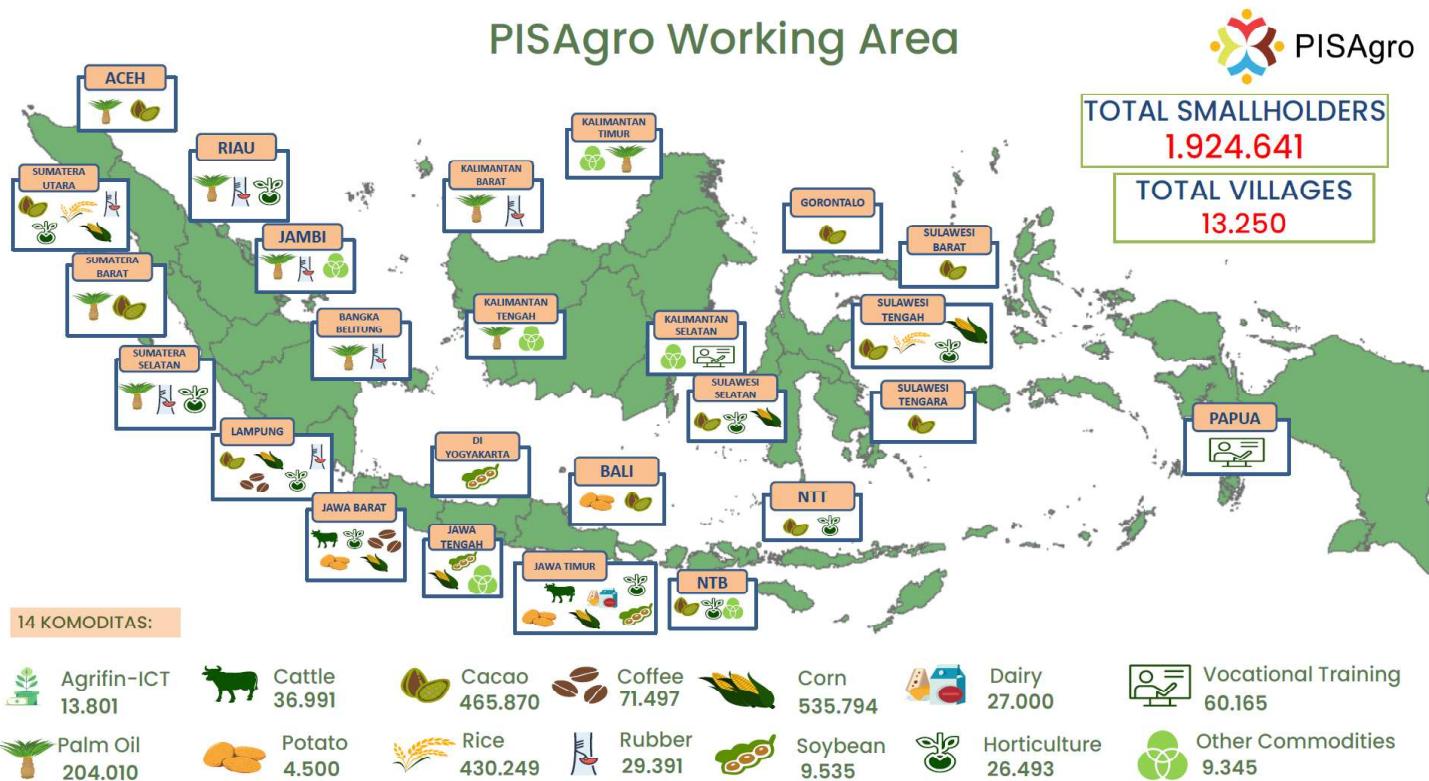
27 kampanye	26 sosialisasi	13 pelatihan
-----------------------	--------------------------	------------------------

dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

HIGHLIGHTS

ACHIEVEMENT OF THE PISAGRO 2.0 DASHBOARD TO DATE - FEBRUARY 2023

(Written by: Fathan Oktrisaf, Hendri Surya Widcaksana, and Sandra Pratiwi)



PISAGRO 2.0 DASHBOARD



55
villages

18.077
smallholders

25.055
ha of farm

HIGHLIGHTS

OVERVIEW



GROWTH

39% of smallholders have the **access to financial support** (KUR, loans, grants)
7.001 out of 18.077

77% of total harvest by smallholders are sold to **partnered companies** (114.829 tons harvest)

23% of smallholders **participated in cooperative**
4.096 out of 18.077

RESILIENCE

53%
29 out of 55



at least
2

villages supported by company on their **resilience** capability
health facilities operated in each village supported by company

Type of **activities** conducted by company to increase smallholders' health condition quality:

29
campaign

26
socialization

occurring 1-2 times a year

SUSTAINABILITY

58%
30 out of 53

48%
7.472 out of 14.734 ha of land

Type of **activities** conducted by company to support smallholders implement **management waste**:

52
campaign

47
socialization

54
trainings

occurring 2-3 times a year

GROWTH

39%
7.001 out of 18.077

of smallholders have the **access to financial support** (KUR, loans, grants)

77%

of total harvest by smallholders are sold to **partnered companies** (114.829 tons harvest)

23%
4.096 out of 18.077

of smallholders **participated in cooperative**

31%

of smallholders participated in **GAP** training conducted by company (occurring 2-3 times a year)

15%
5.417 out of 18.077

of smallholders implemented **Good Agricultural Practice (GAP)** in their whole production process

3.266 smallholders implement Good Agricultural Practice in **input-sourcing** process

3.026 smallholders implement Good Agricultural Practice in **post-harvest** process

3.185 smallholders implement Good Agricultural Practice in **farming operations** process

Smallholders' **average income per month** in each commodities²:



4.2 Million IDR



2.5 Million IDR



5.0 Million IDR



3.5 Million IDR

¹ Good Agricultural Practice (GAP) is a guideline commonly used by smallholders to help them implement sustainability practice in agriculture and to ensure the product quality & safety

HIGHLIGHTS

RESILIENCE



at least

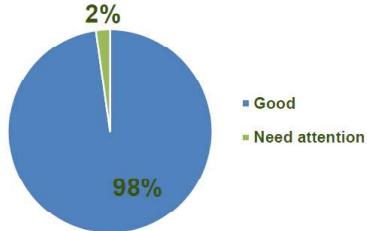
2

health facilities operated in each village supported by company (puskesmas, posyandu, hospital)

33%
6.029 out of 18.077
of smallholders implemented
act of prevention on calamity

- **4.947 smallholders** used adequate equipment and tools to prevent climate calamity occurrence
- **4.912 smallholders** implemented agricultural practice to prevent fire calamity occurrence
- **5.485 smallholders** implemented agricultural practice to prevent flood calamity occurrence

Smallholders' average health condition in each village²



Type of **activities** conducted by company to increase smallholders' **health condition** quality:

29 campaign **26** socialization
occurring 1-2 times a year

² based on annual check-up conducted

SUSTAINABILITY



48%

7.472 out of 14.734 ha of land

of total land farm from palm oil companies are under implementation of land sustainable management

Activities conducted by company to support smallholders on implementing:

Land Sustainable Management

25 campaign **25** socialization **23** training
occurring 2-3 times a year

Waste Management

52 campaign **47** socialization **54** training
occurring 2-3 times a year

Biodiversity Management

3 campaign **2** socialization **3** training
occurring 1 times a year

GHG & Carbon Management

27 campaign **26** socialization **13** training
occurring 2-3 times a year



Diskusi Kelompok Terpusat "Mengukur Living Income Petani Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Rantai Pasok yang Berkelaanjutan"

Pada tanggal 9 Februari 2023, Sekretariat PISAgro, didukung oleh Unilever Indonesia, telah melaksanakan forum diskusi terarah dengan tema: "Mengukur Living Income Petani Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Rantai Pasok yang Berkelaanjutan". Konsep pendapatan hidup (*Living Income*) adalah salah satu prinsip yang memiliki peran sangat penting untuk memastikan praktik produksi yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan.

Diskusi bertujuan untuk membahas konsep *Living Income* yang dapat digunakan sebagai acuan terkait penghasilan wajar yang dibayarkan kepada petani agar mereka dapat berinvestasi dalam praktik pertanian berkelanjutan dan mencapai pendapatan hidup yang memenuhi berbagai parameter gaya hidup dasar namun layak.

Rapat Pengurus dan Rapat Umum PISAgro #1 2023

Pada tanggal 14 Februari 2023, Sekretariat PISAgro mengadakan rapat pengurus dan rapat umum dengan tema "How to reshape our organisational governance: making concerted, delegated, and sustained effort for contribution" yang diselenggarakan secara virtual.

Pada rapat ini, terdapat beberapa agenda yang dilaksanakan, diantaranya adalah pencapaian di tahun 2022, perkembangan dasbor PISAgro 2.0, restrukturisasi tata kelola, serta pembahasan narasi tunggal komoditas dan *scale-up module*. Dari rapat tersebut, dihasilkan capaian berupa masukan-masukan dari para board untuk *scale-up module*, narasi tunggal komoditas, dan restrukturisasi tata kelola, yang kemudian ketiganya dipresentasikan di rapat umum.

Audiensi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Pada tanggal 22 Februari 2023, Sekretariat PISAgro beserta perwakilan dari kelompok kerja Kakao, Kopi, dan Sawit, mengadakan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Audiensi ini dilakukan dalam rangka menggali peluang kolaborasi serta sinergi antarpihak untuk meningkatkan produktivitas pekebun. Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, menyambut niat baik dari PISAgro dan terbuka kolaborasi dengan siapa saja sepanjang niat tulus membangun perkebunan dan sesuai regulasi. Kerjasama atau sinergi dilakukan dengan tujuan demi perkebunan maju, mandiri dan modern.

Lokakarya LPEM FEB UI, ‘Investasi Berdampak untuk Transisi Menuju Masyarakat Nol Karbon di Asia

Pada tanggal 22 Februari 2023, salah satu perwakilan kami, Hendri Surya W., mewakili PISAgro untuk menghadiri lokakarya ‘Investasi Berdampak untuk Transisi Menuju Masyarakat Nol Karbon di Asia’ yang diselenggarakan oleh LPEM FEB UI bersama ADB Institute dan *Graduate School of Public Policy (GraSPP) University of Tokyo* di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Lokakarya ini menjadi sarana untuk membantu mempromosikan berbagai pengetahuan dan pengalaman antara pemangku kepentingan dari Asia dan Jepang. Hasil dari diskusi lokakarya adalah wawasan tentang peluang kemitraan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Asia melalui pemberian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Tinggi Bappenas ‘Peningkatan Biofortifikasi dalam Transformasi Sistem Pangan’

Pada tanggal 28 Februari 2022, Manajer Komunikasi dan Sosial Media PISAgro, Hendri Surya W., mewakili Sekretariat PISAgro sebagai panelis dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Tinggi ‘Peningkatan Biofortifikasi dalam Transformasi Sistem Pangan’ yang diselenggarakan oleh Bappenas di Kantor Pusat Bappenas di Jakarta Pusat.

Pada kesempatan kali ini, PISAgro beserta panelis lainnya dari berbagai pihak, yakni perusahaan swasta, dan lembaga negara, berkesempatan memberikan pemaparan berupa peranan model kemitraan multipihak dalam upaya mendukung transformasi sistem pangan di Indonesia, serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui biofortifikasi bahan pangan.

SOROTAN

Jurisdiction Collective Action Forum #16 2023

Pada tanggal 28 Februari 2023, Manajer Pelibatan Strategis PISAgro, Sandra Pratiwi, mewakili PISAgro sebagai MC dalam Dialog Interaktif JCAF tentang ‘Aksi Kolektif di Yurisdiksi, Kemajuan Kabupaten: 2022 dan Peluang di tahun 2023’, yang diselenggarakan secara daring.

Diskusi interaktif ini membahas tentang strategi penguatan tata kelola di tingkat daerah melalui penyelarasan peta jalan yang terintegrasi lintas pihak, ekosistem untuk investasi di yurisdiksi dan instrumen pembiayaan potensial untuk menciptakan Pusat Pembiayaan untuk mendukung pemerintah sub-nasional, serta identifikasi dan pengembangan peluang bisnis untuk katalisasi komitmen baik pihak swasta dan pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan hutan serta pencapaian agenda iklim.

HIGHLIGHTS



PISAgro

Focus Group Discussion "Measuring Indonesian Farmers' Living Income for Food Security and a Sustainable Supply Chain"

On 9 February 2023, the PISAgro Secretariat, supported by Unilever Indonesia, held a focused discussion forum with the theme: "Measuring the Living Income of Indonesian Farmers for Food Security and a Sustainable Supply Chain". The concept of living income is one of the principles that has a very important role to ensure production practices that are socially just and environmentally sound.

The discussion aims to discuss the concept of Living Income which can be used as a reference regarding a reasonable income paid to farmers so that they can invest in sustainable agricultural practices and achieve a living income that meets various basic but decent lifestyle parameters.

PISAgro Board Meeting and General Meeting #1 2023

On 14 February 2023, the PISAgro Secretariat held a board meeting and general meeting with the theme "How to reshape our organizational governance: making concerted, delegated, and sustained effort for contribution" which was held virtually.

At this meeting, several agendas were conducted, including achievements in 2022, development of the PISAgro 2.0 dashboard, restructuring of governance, and discussion of single commodity narratives and scale-up modules. From the meeting, results were produced in the form of inputs from the boards for scale-up modules, a single commodity narrative, and governance restructuring, which were then presented at the general meeting.

Audience with the Directorate General of Plantations, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia

On February 22, 2023, the PISAgro Secretariat and representatives from the Cocoa, Coffee and Oil Palm working group held an audience with the Directorate General of Plantations, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, which was held at the Head Office of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia.

This hearing was conducted in order to explore opportunities for collaboration and synergy between parties to increase the productivity of smallholders. The Director General of Plantations, Andi Nur Alam Syah, welcomes the good intentions of PISAgro and is open to collaboration with anyone as long as the sincere intention to develop plantations is in accordance with regulations. Collaboration or synergy is carried out with the aim of advancing, independent and modern plantations.

LPEM FEB UI Workshop, 'Investing with Impact for the Transition Towards a Zero Carbon Society in Asia'

On 22 February 2023, one of our representatives, Hendri Surya W., represented PISAgro to attend the workshop 'Investing with Impact for the Transition Towards a Zero Carbon Society in Asia' organized by LPEM FEB UI with ADB Institute and Graduate School of Public Policy (GraSPP) University of Tokyo at Hotel Borobudur, Central Jakarta.

This workshop is a vehicle to help promote the sharing of knowledge and experiences between stakeholders from Asia and Japan. The outcome of the workshop discussions was insight into partnership opportunities to enhance sustainable and inclusive development in Asia through responsible and sustainable financing.

Bappenas High Level Stakeholder Meeting 'Promoting Biofortification in Food System Transformation'

On 28 February 2022, PISAgro Communications and Social Media Manager, Hendri Surya W., represented the PISAgro Secretariat as a panelist at the High Level Stakeholder Meeting 'Increasing Biofortification in Food System Transformation' held by Bappenas at Bappenas Head Office in Central Jakarta.

On this occasion, PISAgro and other panelists from various parties, namely private companies and state institutions, had the opportunity to provide presentations in the form of the role of a multi-stakeholder partnership model in an effort to support the transformation of the food system in Indonesia, as well as improve the nutritional quality of the Indonesian people through biofortification of foodstuffs.

HIGHLIGHTS

Jurisdiction Collective Action Forum #16 2023

On 28 February 2023, PISAgro Strategic Engagement Manager, Sandra Pratiwi, represented PISAgro as MC in the JCAF Interactive Dialogue on 'Collective Action in Jurisdictions, District Progress: 2022 and Opportunities in 2023', which was held online.

This interactive discussion discussed strategies to strengthen governance at the regional level through the alignment of an integrated roadmap across parties, ecosystems for investment in jurisdictions and potential financing instruments to create Financing Centers to support sub-national governments, as well as identification and development of business opportunities to catalyze commitments both the private sector and government towards poverty alleviation and forest protection and achievement of the climate agenda.

MENGENAL LEBIH DEKAT DENGAN LIVING INCOME DAN BAGAIMANA CARA PENGHITUNGANNYA

(Disusun oleh Hendri Surya Widaksana)



"Jika petani kecil yang berdedikasi untuk memproduksi tanaman berharga seperti kopi atau kakao tidak mampu memenuhi standar hidup yang layak dari pendapatan mereka, rantai pasokan pangan global tidak akan pernah berkelanjutan, masyarakat pedesaan tidak akan makmur dan lingkungan alam akan menderita akibatnya."

Fairtrade International

Peternakan keluarga adalah bisnis kecil. Petani hidup dari keuntungan yang mereka peroleh dari pertanian mereka, mengikuti pola musiman tanaman mereka.

Pendapatan hidup didefinisikan sebagai pendapatan yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi semua anggota rumah tangga – termasuk makanan bergizi, air bersih, perumahan yang layak, pendidikan, perawatan kesehatan dan kebutuhan

penting lainnya, ditambah sedikit tambahan untuk keadaan darurat dan tabungan – sekali biaya pertanian ditanggung.

Menurut The Living Income Community of Practice, pendapatan hidup didefinisikan sebagai berikut:

"Penghasilan bersih tahunan yang dibutuhkan oleh sebuah rumah tangga di suatu tempat tertentu untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi semua anggota rumah tangga tersebut."

"Unsur-unsur penghidupan yang layak meliputi: pangan, air, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, sandang, dan kebutuhan esensial lainnya termasuk bekal untuk kejadian tak terduga".

Konsep pendapatan hidup melampaui gagasan tradisional tentang pengentasan kemiskinan yang berkaitan dengan penghidupan dasar dan kelangsungan hidup. Ini memberi penekanan kuat

pada gagasan kesopanan dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup nyaman.

Saat memikirkan pendapatan, bukan upah, penting untuk menyadari bahwa pendapatan yang diperoleh rumah tangga dapat berasal dari berbagai sumber. Dalam kasus petani kecil misalnya, pendapatan dapat diperoleh melalui bisnis di luar pertanian dan pengiriman uang serta dari penjualan hasil panen. Pendapatan ini perlu menutupi biaya hidup layak agar dianggap sebagai pendapatan hidup.

Petani kecil hampir tidak memiliki kendali atas harga pasar global dan kekuatan negosiasi yang lemah hingga tidak ada, karena ketidakstabilan harga dan niat baik mitra pasar mereka. Pada saat kelebihan pasokan dan spekulasi pasar, harga komoditas bisa turun di bawah biaya produksi sehingga petani bahkan tidak bisa mencapai titik impas. Periode rendah harga yang berkepanjangan, seperti yang terlihat akhir-akhir ini untuk kakao dan kopi, berdampak buruk pada penghidupan petani dan keberlanjutan pasokan jangka panjang.

Ketika petani terjebak dalam kemiskinan, mereka tidak mampu berinvestasi dalam metode pertanian yang lebih efisien atau produktif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mereka tidak dapat membayar pekerjaanya dengan upah yang layak, atau lebih buruk lagi, mereka mungkin menggunakan anak-anak untuk tenaga kerja murah. Beberapa mungkin beralih ke pembukaan hutan secara ilegal atau menanam tanaman terlarang dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak. Lainnya meninggalkan tanah mereka sama sekali untuk mencari peluang mata pencaharian alternatif di kota atau di luar negeri.

Selain itu, petani menanggung sebagian besar risiko kerugian yang disebabkan oleh pola cuaca ekstrim, serangan hama dan penyakit tanaman, yang membuat usaha mereka semakin rentan.

Bagaimana menghitung harga referensi pendapatan hidup?

Harga Rujukan Pendapatan Hidup Fairtrade dihitung berdasarkan tiga parameter utama:

1. Biaya untuk mendukung penghidupan yang layak (sebagaimana ditetapkan oleh para ahli independen)
2. Biaya produksi berkelanjutan
3. Tolok ukur produktivitas

Biaya hidup layak (atau 'tolok ukur pendapatan hidup') ditetapkan untuk rata-rata rumah tangga di negara atau wilayah tertentu, dan meliputi: pengeluaran untuk makanan (selain makanan yang diproduksi di pertanian untuk konsumsi rumah), perumahan yang layak, pendidikan, perawatan kesehatan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya, serta bekal kecil untuk kejadian tak terduga.

Biaya produksi didasarkan pada penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang diperlukan untuk mencapai tingkat produktivitas target, seperti mengganti pohon tua dengan jadwal yang teratur dan menggunakan input yang memadai. Jika mempekerjakan pekerja tambahan diperlukan, biaya untuk membayar pekerja tersebut dengan upah layak juga disertakan.

Parameter produktivitas didasarkan pada asumsi yang disepakati untuk hasil yang dapat dicapai, dan ukuran kebun di mana tenaga kerja rumah tangga dewasa dapat dipekerjakan sepenuhnya. Dengan variabel-variabel ini, kami menghitung Harga Rujukan Pendapatan Hidup untuk menunjukkan harga yang dibutuhkan petani penuh waktu untuk memenuhi hasil target agar memiliki pendapatan hidup.

Konsep Harga Referensi pendapatan hidup

Harga Rujukan Penghasilan Hidup menunjukkan harga yang dibutuhkan untuk rumah tangga petani rata-rata dengan luas lahan yang layak dan tingkat produktivitas yang memadai untuk mencari nafkah dari penjualan hasil panen mereka. Itu didasarkan pada parameter kunci berikut:

- Biaya standar hidup yang layak (Patokan Pendapatan Hidup)
- Hasil yang berkelanjutan (tolok ukur produktivitas)
- Ukuran lahan yang layak (untuk sepenuhnya mempekerjakan tenaga kerja rumah tangga yang tersedia)
- Biaya produksi berkelanjutan (untuk mencapai hasil yang disebutkan di atas)

Penting untuk dicatat bahwa untuk menghitung harga referensi, kami fokus pada tanaman tertentu sebagai lingkup pengaruh kami. Meskipun diakui bahwa pendapatan pertanian dapat didiversifikasi dengan baik, formulanya didasarkan pada produk tertentu sebagai tanaman tunggal, dengan asumsi bahwa aktivitas pertanian lainnya akan sama menguntungkannya dengan tanaman tertentu dan dengan demikian menghasilkan bagian proporsional dari pendapatan hidup. Harga yang memungkinkan

rata-rata rumah tangga petani dengan ukuran lahan yang layak dan tingkat produktivitas yang berkelanjutan untuk memperoleh penghasilan hidup dihitung dengan rumus: harga x total volume produksi = biaya hidup layak + biaya produksi berkelanjutan.

Menetapkan Harga Rujukan Penghasilan Hidup

Bagian berikut menjelaskan bagaimana nilai untuk setiap parameter yang ditentukan.

Tolok ukur Pendapatan Hidup

Pendapatan Hidup Layak didefinisikan sebagai pendapatan yang cukup yang dihasilkan oleh rumah tangga untuk memenuhi standar hidup yang layak bagi anggota rumah tangga. Unsur-unsur standar hidup yang layak meliputi: pangan, air, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, sandang, dan kebutuhan penting lainnya, termasuk bekal untuk kejadian tak terduga.

Jika sebuah rumah tangga biasanya memproduksi tanaman pangan untuk konsumsi rumah tangga, ini akan dianggap sebagai pendapatan natura yang harus dikurangkan dari biaya hidup karena mengurangi pengeluaran makanan untuk rumah tangga tersebut.

Hasil yang berkelanjutan

Tingkat produktivitas yang memadai ditentukan berdasarkan hasil yang layak, diperoleh saat menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

Dalam menetapkan tolok ukur produktivitas, sangat penting untuk mempertimbangkan potensi efek makro yang merugikan dari peningkatan hasil. Peningkatan produktivitas yang tajam di seluruh sektor akan menyebabkan kelebihan pasokan dan tekanan ke bawah pada harga komoditas. Selain itu, hasil yang lebih tinggi tidak selalu berarti keuntungan yang lebih tinggi bagi petani. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan hasil maksimal yang mungkin dengan keuntungan optimal bagi petani dalam jangka panjang.

Ukuran peternakan yang layak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan: "Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan yang menjamin bagi dirinya dan keluarganya suatu kehidupan yang bermartabat sebagai manusia." Oleh karena itu, pekerja sewaan memiliki hak atas upah layak dan petani wiraswasta harus dapat memperoleh pendapatan hidup dari proses pertanian mereka. Mengikuti prinsip ini, sebuah peternakan harus cukup besar untuk menyerap sepenuhnya rata-rata tenaga kerja rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan hidup. Ini akan dianggap sebagai ukuran lahan yang layak atau "ukuran lahan dengan tenaga kerja penuh".

Biaya Produksi Berkelanjutan

Biaya yang terkait dengan menghasilkan hasil yang berkelanjutan cenderung lebih tinggi daripada biaya produksi saat ini, karena produktivitas yang rendah sebenarnya sering kali merupakan hasil dari investasi pertanian yang rendah. Oleh karena itu kita perlu memproyeksikan biaya produksi pada tingkat hasil yang berkelanjutan.

Perhitungan ini didasarkan pada tenaga kerja rumah tangga tidak dibayar yang dipekerjakan penuh. Kebutuhan tenaga kerja upahan tambahan diperhitungkan dalam Upah Hidup Layak. Dengan cara ini harga referensi pendapatan hidup mencakup pendapatan hidup untuk anggota rumah tangga (asalkan tenaga kerja rumah tangga yang tersedia dipekerjakan secara efektif di pertanian mereka) dari keuntungan pertanian dan upah hidup untuk pekerja upahan.

Source: Fairtrade, Living Income Community of Practice



GET TO KNOW MORE ABOUT LIVING INCOME AND HOW TO CALCULATE LIVING INCOME

(Written by Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



"If smallholder farmers dedicated to producing valuable crops like coffee or cocoa cannot afford a decent standard of living from their earnings, global food supply chains will never be sustainable, rural communities won't prosper and the natural environment will suffer the consequences."

Fairtrade International

A family farm is a small business. Farmers live off the profit they make from their farm, following the seasonal patterns of their crops.

A living income is defined as sufficient income to afford a decent standard of living for all household members – including a nutritious diet, clean water, decent housing, education, health care and other essential needs, plus a little extra for emergencies and savings – once farm costs are covered.

According to The Living Income Community of Practice, living income defined as:

"The net annual income required for a household in a particular place to afford a decent standard of living for all members of that household."

"Elements of a decent standard of living include: food, water, housing, education, healthcare, transport, clothing, and other essential needs including provision for unexpected events".

The concept of living income goes a step beyond traditional notions of poverty alleviation that are concerned with basic subsistence and survival. It puts a strong emphasis on the idea of decency and earning enough income to live comfortably.

When thinking about income, as opposed to wages, it is important to recognise that the income that a household earns can come from multiple sources. In the case of smallholder farmers for example, income can be earned through off farm business and remittances as well as from crop sales.

This income needs to cover the costs of decent living for it to be considered a living income.

Smallholder farmers have virtually no control over global market prices and weak to non-existent negotiating power, at the mercy of price volatility and the goodwill of their market partners. In times of oversupply and market speculation, commodity prices can fall below the cost of production so that farmers can't even break even. Prolonged periods of low prices, as seen lately for cocoa and coffee, have disastrous effects on farmers' livelihoods and on the long-term sustainability of supply.

When farmers are trapped in poverty, they can't afford to invest in more efficient or productive farming methods to improve their income. They can't pay their workers a decent wage, or worse, they may resort to using children for cheap labour. Some may turn to illegally clearing forests or growing illicit crops in an attempt to earn more. Others abandon their land altogether in search of alternative livelihood opportunities in cities or abroad.

In addition, farmers bear most of the risks of losses caused by extreme weather patterns, pests and crop diseases, making their businesses even more vulnerable.

How do we calculate a living income reference price?

Fairtrade Living Income Reference Prices are calculated based on three key parameters:

1. Costs to support a decent living (as established by independent experts)
2. Costs of sustainable production
3. Productivity benchmarks

The costs of decent living (or 'living income benchmark') are established for an average household in a specific country or region, and include: food expenditures (other than food that is produced on the farm for home consumption), decent housing, education, healthcare, clothing and other essentials, as well as a small provision for unexpected events.

The production costs are based on the adoption of sustainable agricultural practices required to reach the target productivity level, such as replacing old trees on a regular schedule and using adequate inputs. If hiring extra workers is needed, the costs to pay those workers a living wage are also included.

Productivity parameters are based on agreed assumptions for attainable yields, and a farm size on which the adult household labour can be fully employed.

With these variables, we calculate Living Income Reference Prices to indicate the price that a full-time farmer meeting the target yield would need to earn to have a living income.

Living income Reference Price concept

A Living Income Reference Price indicates the price needed for an average farmer household with a viable farm size and an adequate productivity level to make a living income from the sales of their crop. It is based on the following key parameters:

- Cost of a decent standard of living (Living Income benchmark)
- Sustainable yields (productivity benchmark)
- Viable farm size (to fully employ the available household labour)
- Cost of sustainable production (in order to achieve above mentioned yields)

It is important to note that for calculating the reference price we focus on the certain crop as our sphere of influence. Although it is recognized that farm income may well be diversified, the formula is based on the certain product as a single crop, assuming that any other farm activity would be as profitable as the certain crop and thus generate a proportionate share of the living income. The price that allows an average farmer household with a viable farm size and a sustainable productivity level to earn a living income is calculated with the formula: $\text{price} \times \text{total volumes produced} = \text{cost of decent living} + \text{cost of sustainable production}$.

Establishing a Living income Reference Price

The following section describes how the values for each parameter are determined.

Living Income benchmark

Living Income is defined as sufficient income generated by a household to afford a decent standard of living for the household members. Elements of a decent standard of living include: food, water, housing, education, healthcare, transport, clothing and other essential needs, including a provision for unexpected events.

If a household typically produces food crops for home consumption, these would be considered as in-kind income to be deducted from the cost of living as it reduces the food expenditures for the household.

Sustainable yields

Adequate productivity levels are determined based on feasible yields, obtained when implementing sustainable agricultural practices.

In establishing productivity benchmarks, it is crucial to consider potential adverse macro-effects of increased yields. A sector-wide steep increase in productivity will lead to oversupply and downward pressure on commodity prices. In addition, higher yields do not necessarily translate into higher profitability for farmers. Therefore, we should balance maximum possible yields with optimal returns for the farmer in the long run.

labour needs are factored in at Living Wages. This way the living income reference price covers a living income for the household members (provided the available household labour is effectively employed on their farm) from the farm profits and a living wage for hired workers.

Source: Fairtrade, Living Income Community of Practice

Viable farm size

The Universal Declaration of Human Rights establishes: "Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity." Hence, hired workers have the right to a living wage and self-employed farmers should be able to make a living income from their farm proceedings. Following this principle, a farm should be big enough to fully absorb the average household labour force in order to generate a living income. This would be considered a viable farm size or a "full-employment farm size".

Cost of Sustainable Production

The costs associated with producing sustainable yields are likely to be higher than the current production costs, since the actual low productivity is often a result of low farm investment. Hence we need to project the costs of production at the sustainable yield level.

This calculation is based on fully employed non-remunerated household labour. Additional hired



MENGUKUR *LIVING INCOME* PETANI INDONESIA UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN RANTAI PASOK YANG BERKELANJUTAN

(Disusun oleh Ferial Lubis dan Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



Pada tanggal 9 Februari 2023, didukung oleh Unilever Indonesia, Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro) telah melaksanakan forum diskusi terarah dengan tema: "Mengukur Living Income Petani Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Rantai Pasok yang Berkelaanjutan". Konsep pendapatan hidup (Living Income) adalah salah satu prinsip yang memiliki peran sangat penting untuk memastikan praktik produksi yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan.

Diskusi bertujuan untuk membahas konsep Living Income yang dapat digunakan sebagai acuan terkait penghasilan wajar yang dibayarkan kepada petani agar mereka dapat berinvestasi dalam praktik pertanian berkelanjutan dan mencapai pendapatan hidup yang memenuhi berbagai parameter gaya hidup dasar namun layak. Pendapatan hidup memungkinkan sebuah rumah tangga untuk mendapatkan akomodasi yang layak, makanan bergizi, pendidikan, perawatan kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya. Diskusi ini mendapat sambutan yang baik dari para perwakilan anggota PISAgro yang hadir sebanyak 37 orang.

Diskusi secara resmi dibuka oleh Insan Syafaat (Direktur Eksekutif PISAgro) yang menyatakan bahwa diskusi ini akan sangat bermanfaat karena

menambah pengetahuan peserta mengenai bagaimana cara menghitung Living Income yang lebih comprehensive dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan petani. Diskusi ini diharapkan dapat melengkapi metode perhitungan Living Income yang selama ini telah dilakukan di sektor pertanian.

Acara diawali oleh Muhammad Saifulloh (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) yang menyampaikan keynote speech dengan tema "Pentingnya Memastikan Kesejahteraan Petani Untuk Ketahanan Pangan di Indonesia". Beliau menyatakan bahwa profil kemiskinan Indonesia tahun 2023 digambarkan dengan disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan yang masih tinggi. Persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29%, naik menjadi 12,36% pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 7,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih tinggi dimana penduduk sebagian besar bekerja sebagai petani.

Lebih lanjut Beliau menyatakan bahwa saat ini Living Income petani dihitung dengan menggunakan formula NTP (Nilai Tukar Petani). NTP Tahunan (Januari – Desember) 2022 sebesar 107,33 meningkat 2,57% dibanding NTP 2021 sebesar 104,64. Hal ini

menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani. Namun NTP petani masih belum sesuai dengan harapan, belum menunjukkan perubahan angka kemiskinan yang membaik. Diharapkan forum diskusi ini dapat menghasilkan suatu rumusan yang lebih baik dalam menghitung Living Income petani.

Paparan dalam diskusi diawali dengan presentasi dari Batara Siagian S.P.M.AB (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian) dengan judul materi: "Living Income Petani Indonesia Dan Rantai Pasok Berkelanjutan" Beliau menyatakan bahwa selama ini Kementerian Pertanian menggunakan angka NTP yang ditetapkan oleh BPS terkait perhitungan Living Income petani. Agak sulit menghitung Living Income petani pada subsektor tanaman pangan, karena petani yang sering berganti komoditi yang ditanam dan off taker yang agak kurang jumlahnya pada subsektor tanaman pangan. Kesulitan lainnya adalah petani sering menjual lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga sustainability akan hilang bila kepemilikan tanah hilang. Bagi petani harga komoditi yang dijual adalah sangat penting disamping biaya produksi.

Salah satu usaha Pemerintah dalam meningkatkan Living Income petani adalah dengan memberikan bantuan sehingga biaya produksi menurun. Setiap tahun bantuan tersebut mencapai Rp2,3 triliun hanya untuk sektor tanaman pangan saja. Kedudukan petani Indonesia akan sangat sulit membangun keberlanjutan, apabila dinamika masih seperti sekarang, yaitu rantai pasok terlalu panjang.

Presentasi kedua dengan judul "Kondisi dan Parameter Kesejahteraan Petani Indonesia" disampaikan oleh Elan Satriawan PhD (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K). Beliau secara jelas menerangkan mengenai cara mengukur garis kemiskinan pada petani oleh BPS yang dapat menggambarkan NTP.

Pengukuran garis kemiskinan oleh BPS dilakukan dengan menggunakan nilai Kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Kebutuhan dasar makanan setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori sebanyak 2.100 kkal per kapita per hari (diwakili oleh 52 jenis komoditi, yang paling utama adalah komoditi makanan pokok). Sedangkan Kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan Kesehatan (diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan).

Rumus yang digunakan BPS adalah $\text{à GK} = \text{GKM} + \text{GKNM}$, dimana GK artinya Garis Kemiskinan, GKM artinya Garis Kemiskinan Makanan dan GKNM adalah Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Data yang bersumber pada BPS menyatakan bahwa Garis Kemiskinan/kapita/bulan = Rp 472.525 (BPS, Maret 2021). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Kebutuhan dasar non makanan => kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan Kesehatan (diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan).

Namun Beliau menyatakan bahwa harus hati-hati menggunakan NTP berdasarkan perhitungan garis kemiskinan, karena ada heterogenitas dari petani. Nilai NTP dibawah 100, maka sektor pertaniannya belum menguntungkan. Jadi sekedar melihat NTP tidak cukup untuk menentukan garis kemiskinan petani.

Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa ada dua alternatif pengukuran untuk kemiskinan, untuk seluruh masyarakat, yaitu: Multidimensional Poverty Index (MPI dalam bentuk Index) dan Multidimensional Poverty Measures (MPM dalam bentuk angka). MPI menggunakan indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup untuk menentukan kejadian dan intensitas kemiskinan yang dialami oleh suatu populasi. MPM adalah sebuah indeks yang menggambarkan angka persentase rumah tangga di suatu negara yang kekurangan dalam tiga dimensi kesejahteraan (kemiskinan moneter, pendidikan, dan layanan infrastruktur dasar) untuk memberikan gambaran kemiskinan yang lebih lengkap.

Presentasi terakhir disampaikan oleh Deddy Hariyanto, S.E. (Circle Indonesia) dengan judul: "Anker method to define Living Income". Beliau memberikan pengetahuan dan pengalamannya menggunakan Metode Anker dalam menghitung Living Income petani yang pernah Beliau lakukan di tiga wilayah yaitu di Pangandaran untuk produsen gula kelapa dan di Sidoarjo serta Pinang untuk petambak udang windu, studi dilakukan untuk Unilever Indonesia.

Di awal presentasi Beliau menyatakan bahwa Anker

methods digunakan di banyak negara di dunia dan dapat digunakan untuk berbagai jenis smallholders dari berbagai komoditas atau sektor. Prinsip penerapan Anker Method untuk menghitung Living Income benchmark adalah dengan mengukur Biaya Hidup Dasar Tapi Layak Untuk Referensi Ukuran Keluarga yang terdiri dari empat komponen yaitu: cost of food (biaya makanan) cost of housing (biaya perumahan), cost of other essential needs (biaya keperluan pokok lainnya) dan small margin for unforeseen events (menyediakan untuk kejadian tak terduga dan keadaan darurat).

Studi di berbagai wilayah tersebut didahului dengan: (i) Menyepakati Desain Penelitian; (ii) Penggalian Data Tahap Pertama dengan mengadakan FGD farmers, FGD with Women, Market Survey, KII builders; (iii) Penggalian Data Tahap Kedua dengan melakukan Survei Rumah Tangga; (iv) Melakukan Desk Study menggunakan BPS Data, Dinas PU Data; (vi) Membuat Tabulasi Basic But Decent Living Cost; (vi) Tabulasi Actual Income dan (vii) Membuat Laporan dan Rekomendasi, termasuk membuat kerangka Monitoring dan Evaluasi.

Setelah itu dilakukan perbandingan antara Tabulasi Basic but Decent Living Cost dengan Tabulasi Actual Income sehingga dapat diketahui gap diantaranya dan diketahui bentuk intervensi kebijakan apa yang dibutuhkan.

Berdasarkan berbagai presentasi tersebut serta hasil diskusi yang melibatkan para perwakilan anggota WG PISAgro yang hadir, maka terdapat beberapa poin rekomendasi yang dapat dirumuskan atas cara menghitung Living Income antara lain: Metode Anker dinilai sangat comprehensive dalam menghitung Living Income petani, sehingga menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Sedangkan sebagian besar metode pengukuran yang lain yang digunakan saat ini hanya menghitung pengeluaran dikarenakan lebih mudah untuk memvalidasi data yang didapat. Dalam memotret Living Income perlu juga mendapatkan

gambaran tentang aset petani, seperti apakah modalnya berasal dari utang dan resiko kehilangan aset tersebut karena sejumlah alasan, misalnya pegadaian atau penjualan aset yang dilakukan petani. Selain itu, dibutuhkan metode untuk memotret pendapatan petani dari sumber lain agar mencegah terjadinya underestimation.

Mengatasi gap yang terjadi antara Tabulasi Basic But Decent Living Cost (Tabulasi Biaya Hidup Dasar Tapi Layak) dengan Tabulasi Actual Income (Tabulasi Pendapatan Aktual) tidak hanya diatasi dengan menaikkan harga, namun harus dirinci bagaimana peran dan program Pemerintah dan Swasta di dalamnya.

Diskusi fokus terarah diakhiri dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Rizal Algamar dari TFA yang pada intinya menyatakan bahwa keberlanjutan sektor pertanian harus memperhatikan Living Income petani. Diperlukan kolaborasi multipihak untuk meningkatkan akses dan tata kelola atas financing (pembiayaan) untuk meningkatkan Living Income petani. Perbankan memberikan pembiayaan kepada kelompok tani, korporasi, aggregator atau kelembagaan petani. Dana filantropi adalah dana yang fleksibel untuk dikembangkan sebagai suatu model dan dapat meningkatkan kerjasama untuk memperoleh suatu hasil. Selain itu dana filantropi dapat menghasilkan suatu konsep blended finance mechanism.



MEASURING THE LIVING INCOME OF INDONESIAN FARMERS FOR A SUSTAINABLE FOOD SECURITY AND SUPPLY CHAIN

(Written by Ferial Lubis and Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



On 9 February 2023, supported by Unilever Indonesia, the Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro) held a focused discussion forum with the theme: "Measuring the Living Income of Indonesian Farmers for Food Security and a Sustainable Supply Chain". The concept of living income is one of the principles that has a very important role to ensure production practices that are socially just and environmentally sound.

The discussion aims to discuss the concept of Living Income which can be used as a reference regarding a reasonable income paid to farmers so that they can invest in sustainable agricultural practices and achieve a living income that meets various basic but decent lifestyle parameters. Living income enables a household to obtain adequate accommodation, nutritious food, education, health care and other basic needs. This discussion received a good response from representatives of PISAgro members who were present as many as 37 people.

The discussion was officially opened by Insan Syafaat (Executive Director of PISAgro) who stated that this discussion would be very useful because it would increase participants' knowledge on how to calculate a more comprehensive Living Income by considering various factors that could affect the lives and welfare of farmers. It is hoped that this

discussion will complement the Living Income calculation method that has been carried out so far in the agricultural sector.

The event was started by Muhammad Saifulloh (Coordinating Ministry for Economic Affairs) who delivered a keynote speech with the theme "The Importance of Ensuring Farmers' Welfare for Food Security in Indonesia". He stated that Indonesia's poverty profile in 2023 will be illustrated by the high urban and rural poverty disparities. The percentage of the rural poor population in March 2022 was 12.29%, increasing to 12.36% in September 2022. Meanwhile the percentage of the urban poor population in September 2022 was 7.53%. This shows that rural poverty is still high where most of the population works as farmers.

He further stated that currently the Farmers' Living Income is calculated using the NTP (Farmers Exchange Rate) formula. The 2022 NTP (January – December) is 107.33, an increase of 2.57% compared to the 2021 NTP of 104.64. This shows an improvement in the welfare of farmers. However, the farmer's NTP is still not in line with expectations, has not shown an improvement in the poverty rate. It is hoped that this discussion forum can produce a better formula in calculating farmers' living income.

The presentation in the discussion began with a presentation from Batara Siagian S.P, M.AB (Directorate General of Food Crops, Ministry of Agriculture) with the material title: "Living Income of Indonesian Farmers and Sustainable Supply Chains". He stated that so far the Ministry of Agriculture uses NTP figures set by BPS regarding the calculation of living income of farmers. It is rather difficult to calculate the living income of farmers in the food crops sub-sector, because farmers often change the commodities planted and the number of off takers is somewhat less in the food crops sub-sector. Another difficulty is that farmers often sell their land to make ends meet so that sustainability will be lost if land ownership is lost. For farmers the price of the commodity being sold is very important in addition to production costs.

One of the Government's efforts to increase the Living Income of farmers is to provide assistance so that production costs decrease. Every year this assistance reaches IDR 2.3 trillion just for the food crop sector. The position of Indonesian farmers will be very difficult to build sustainability, if the dynamics are still as they are now, namely the supply chain is too long.

The second presentation entitled "Conditions and Welfare Parameters of Indonesian Farmers" was delivered by Elan Satriawan PhD (National Team for the Acceleration of Poverty Reduction/TNP2K). He clearly explained how to measure the poverty line for farmers by BPS which can describe NTP.

The measurement of the poverty line by BPS is carried out using the value of basic food and non-food needs. The basic need for food is equivalent to meeting the calorie needs of 2,100 kcal per capita per day (represented by 52 types of commodities, the most important of which are staple food commodities). While non-food basic needs are the minimum needs for housing, clothing, education, and health (represented by 51 types of commodities in urban areas and 47 types of commodities in rural areas).

The formula used by BPS is $\text{à GK} = \text{GKM} + \text{GKNM}$, where GK means Poverty Line, GKM means Food Poverty Line and GKNM is Non-Food Poverty Line. Poor people are residents who have an average monthly per capita expenditure below the poverty line. Data sourced from BPS states that the poverty line/capita/month = IDR 472,525 (BPS, March 2021).

Poor people are residents who have an average monthly per capita expenditure below the poverty line. Non-food basic needs => minimum needs for housing, clothing, education, and health (represented by 51 types of commodities in urban areas and 47 types of commodities in rural areas).

However, he stated that one must be careful when using FTT based on poverty line calculations, because there is heterogeneity among farmers. The NTP value is below 100, so the agricultural sector is not yet profitable. So simply looking at NTP is not enough to determine the poverty line of farmers.

Furthermore, he explained that there are two alternative measurements for poverty, for the whole community, namely: the Multidimensional Poverty Index (MPI in the form of an Index) and Multidimensional Poverty Measures (MPM in the form of numbers). MPI uses indicators of health, education, and standard of living to determine the incidence and intensity of poverty experienced by a population. The MPM is an index that describes the percentage of households in a country that are deficient in all three dimensions of well-being (monetary poverty, education, and basic infrastructure services) to provide a more complete picture of poverty.

The last presentation was delivered by Deddy Hariyanto, S.E. (Circle Indonesia) with the title: "Anker method to define Living Income". He shared his knowledge and experience using the Anker Method in calculating the Living Income of farmers which he had done in three areas, namely in Pangandaran for coconut sugar producers and in Sidoarjo and Pinang for tiger shrimp farmers, a study conducted for Unilever Indonesia.

At the beginning of the presentation he stated that Anker methods are used in many countries in the world and can be used for various types of smallholders from various commodities or sectors. The principle of applying the Anker Method to calculate the Living Income benchmark is to measure Basic but Adequate Living Costs for Family Size Reference which consists of four components, namely: cost of food, cost of housing, cost of other essential needs. other basic needs) and small margin for unforeseen events (providing for unexpected events and emergencies).

Studies in these various areas are preceded by: (i)

Agreeing on a Research Design; (ii) First Phase of Data Collection by holding FGD farmers, FGD with Women, Market Survey, KII builders; (iii) Second Phase of Data Collection by conducting a Household Survey; (iv) Conducting Desk Study using BPS Data, Office of Public Works Data; (vi) Make Basic But Decent Living Cost Tabulation; (v) Tabulation of Actual Income and (vii) Making Reports and Recommendations, including preparing a Monitoring and Evaluation framework.

After that, a comparison was made between the Basic but Decent Living Cost Tabulation and the Actual Income Tabulation so that the gaps between them could be identified and what form of policy intervention was needed.

Based on these various presentations as well as the results of discussions involving WG PISAgro representatives who were present, there are several recommendation points that can be formulated for how to calculate living income, including: The Anker method is considered very comprehensive in calculating farmers' living income, so it is interesting to study further. Meanwhile, most of the other measurement methods used today only calculate expenses because it is easier to validate the data obtained. In photographing Living Income, it is also necessary to get an overview of the farmer's assets, such as whether the capital comes from debt and the risk of losing these assets due to a number of reasons, such as pawnshops or selling assets by farmers. In addition, a method is needed to capture farmer income from other sources in order to prevent underestimation.

Overcoming the gap that occurs between the Basic But Decent Living Cost Tabulation and the Actual Income Tabulation is not only overcome by increasing prices, but it must specify the roles and programs of the Government and the Private sector in it.

The focused focus discussion ended with the conclusions conveyed by Dr. Rizal Algamar from TFA, which basically stated that the sustainability of the agricultural sector must pay attention to the living income of farmers. Multi-stakeholder collaboration is needed to improve access to and governance of financing to increase farmers' living income. Banking provides financing to farmer groups, corporations, aggregators or farmer institutions. Philanthropy funds are flexible funds to be developed as a model and can increase collaboration to achieve a result. In addition, philanthropic funds can produce a blended finance mechanism concept.



MENDORONG SINERGI DAN PRODUKTIVITAS PEKEBUN MELALUI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN MODEL KEMITRAAN MULTIPIHAK YANG INKLUSIF

(Hasil audiensi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Disusun oleh Ferial Lubis dan Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



Pada tanggal 22 Februari 2023, Sekretariat PISAgro beserta perwakilan dari kelompok kerja Kakao, Kopi, dan Sawit, mengadakan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Pada audiensi ini, Sekretariat PISAgro memfasilitasi anggota WG Palm Oil, Cocoa, and Coffee untuk melakukan audiensi ke Ditjenbun Kementerian RI, yang dimana Sekretariat memperkenalkan masing-masing Working Group serta mengutarakan niat PISAgro untuk potensi kerjasama untuk masa yang akan datang, serta program maupun kegiatan yang sudah dijalankan.

PISAgro merupakan wadah kemitraan antara pemerintah Indonesia, sektor industri dan publik yang dimaksudkan untuk mendukung

Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan sebagai bagian dalam pembangunan ketahanan pangan di Indonesia. PISAgro beranggotakan sejumlah perusahaan nasional dan internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi internasional.

Pemaparan oleh Direktur Eksekutif PISAgro

Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif PISAgro, Insan Syafaat, menyampaikan bahwa PISAgro telah bermitra dengan 2 juta petani khususnya terkait komoditas kelapa sawit, kopi, kakao dan karet.

“Terdapat beberapa akses yang difasilitasi untuk bermitra dengan petani, yakni akses ke bahan input, akses ke off-taker, akses peningkatan kapasitas (kuliah umum, perbaikan kurikulum,

fasilitasi permagangan), serta akses ke perbankan. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan, yakni produktivitas petani dan akses keuangan petani". ujarnya.

Insan menambahkan, bahwa PISAgro berperan sebagai perangkai gotong royong untuk pemetaan ekosistem untuk menunjang pertanian yang lebih inklusif dan resilien.

Kunjungan ini dalam rangka mengajak berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan kapabilitas pekebun melalui korporasi.

Tantangan dalam Industri Perkebunan

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan tantangan dalam industri perkebunan.

"Sebanyak 30-40% lahan perkebunan tidak lagi produktif, masih menghasilkan tetapi sudah tidak optimal. Dalam implementasi peremajaan lahan perkebunan, terdapat sejumlah masalah meskipun anggarannya sudah cukup. Meskipun demikian, masih tetap optimis akan peningkatan produktivitas petani.", ujarnya.

Selain itu, beliau menambahkan bahwa program nursery menjadi penguat program Peremajaan Sawit Rakyat yang terdiri dari peningkatan kapasitas, pengadaan benih, serta negosiasi dan pemutakhiran basis data

Penyambutan Niat Baik PISAgro

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, menyambut niat baik dari PISAgro dan terbuka kolaborasi dengan siapa saja sepanjang niat tulus membangun perkebunan dan sesuai regulasi. Kerjasama atau sinergi dilakukan dengan tujuan demi perkebunan maju, mandiri dan modern.

Pada kesempatan tersebut, Andi Nur mengatakan bahwa, "Perlunya kemitraan usaha perkebunan untuk membantu pekebun meningkatkan kualitas hasil produksi dan produktivitasnya, dari hulu hingga ke hilir," katanya.

Andi Nur menambahkan, Seperti tertuang pada UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada pasal 57 terkait Kemitraan Usaha

Perkebunan. Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.

Pemaparan dari Beberapa Kelompok Kerja

Pada kesempatan ini, beberapa kelompok kerja, termasuk sawit, menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi, implementasi model kemitraan inklusif, serta pentingnya kemitraan multipihak dalam upaya pengembangan produktivitas perkebunan.

Salah satu perwakilan Kelapa Sawit, Bapak R. Azis Hidayat, menjelaskan bahwa integrasi program Peremajaan Sawit Rakyat dengan lembaga terkait seperti ISPO, sangat penting, yang dimana integrasi ini mampu membantu proses negosiasi kemampuan telusuran produk sawit ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. "WG Palm Oil menjalankan kolaborasi dengan berbagai institusi, termasuk Kemenlu, untuk mendorong percepatan PSR dan ISPO", ujarnya.

Selain itu, beliau menambahkan bahwa WG Palm Oil mempunyai model kemitraan strategis closed-loop model, yang dimana programnya sudah diimplementasikan di Riau, bekerjasama dengan BRI yang menggelontorkan Rp1,756 triliun untuk program tersebut.

Dari Kelompok Kerja Kakao, Bapak Danang, perwakilan dari WG Kakao, membenarkan tantangan yang dipaparkan oleh Ditjenbun di perkebunan kakao di Indonesia. "Bibit menjadi kunci utama dalam pengembangan industri kakao, mengingat dari 1,4 juta hektar lahan kakao di Indonesia, 1 juta hektar (800 juta pohon) diantaranya memerlukan peremajaan", ujarnya.

Selain itu, beliau menambahkan bahwa butuh 300 tahun untuk menyelesaikan masalah pada perkebunan kakao jika masih menggunakan business-as-usual. Oleh karenanya Multistakeholder Partnership menjadi kunci utama untuk menyelesaikan masalah tersebut

Kemitraan Usaha Perkebunan

Kemitraan Usaha Perkebunan dapat berupa pola kerja sama seperti penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan & pemasaran, kepemilikan saham, serta jasa pendukung lainnya.

Ia menjelaskan, Demi peningkatan kapabilitas pekebun, Direktorat Jenderal Perkebunan pernah melakukan kerjasama dengan PT Nestle Indonesia beberapa waktu lalu, dalam hal pengembangan sumber daya manusia khususnya bagi pekebun kopi melalui Program Korporasi Pekebun Kopi, meliputi bimbingan teknis pengetahuan budidaya tanaman kopi mulai dari hulu (budidaya) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran), pengawalan dan pendampingan budidaya tanaman kopi untuk pekebun, serta pemanfaatan pengolahan teknologi manajemen dan kelembagaan terhadap korporasi pekebun.

“Semoga dengan adanya sinergi dan kolaborasi melalui kemitraan usaha perkebunan dapat membantu memaksimalkan pendapatan petani, dan saling menguntungkan.

SPECIAL PRESENTATION

PROMOTING SYNERGY AND PRODUCTIVITY OF SMALLHOLDERS THROUGH PLANTATION DEVELOPMENT WITH INCLUSIVE MULTISTAKEHOLDER MODEL

(Results of an audience with the Directorate General of Plantations, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. Compiled by Ferial Lubis and Hendri Surya Widcaksana, PISAgro)



On February 22, 2023, the PISAgro Secretariat and representatives from the Cocoa, Coffee and Oil Palm working group held an audience with the Directorate General of Plantations, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, which was held at the Head Office of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia.

In this audience, the PISAgro Secretariat facilitated members of the WG Palm Oil, Cocoa and Coffee to conduct audiences with the Directorate General of Plantation of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, where the Secretariat introduced each Working Group and expressed PISAgro's intentions for potential future collaborations, as well as programs and activities which has been executed.

PISAgro is a partnership forum between the Indonesian government, the industrial sector and the public which is intended to support the Indonesian Government in efforts to increase sustainable agricultural productivity as part of the development of food security in Indonesia. PISAgro consists of a number of national and international companies, non-governmental organizations (NGOs) and international organizations.

Presentation by the Executive Director of PISAgro

On this occasion, the Executive Director of PISAgro, Insan Syafaat, said that PISAgro has partnered with 2 million farmers, especially those related to palm oil, coffee, cocoa and rubber commodities.

"There are several facilitated accesses for partnering with farmers, namely access to input materials, access to off-takers, access to capacity building (public lectures, curriculum improvements, facilitation of apprenticeships), and access to banking. Even so, there are several challenges, namely farmer productivity and access to farmers' finances. he said.

Insan added, that PISAgro has a role as a mutual cooperation agent for ecosystem mapping to support more inclusive and resilient agriculture.

This visit is intended to invite collaboration and synergy to increase the capability of smallholders through corporations.

Challenges in the Plantation Industry

The Director General of Plantations, Andi Nur Alam Syah, explained the challenges in the plantation industry.

"As many as 30-40% of plantation land is no longer productive, still producing but not optimal. In the implementation of plantation land rejuvenation, there are a number of problems even though the budget is sufficient. Even so, we are still optimistic about increasing farmer productivity," he said.

In addition, he added that the nursery program strengthens the People's Palm Oil Rejuvenation program which consists of capacity building, seed procurement, as well as negotiation and database updating.

Warm Welcome to PISAgro's Goodwill

The Director General of Plantations, Andi Nur Alam Syah, welcomes the good intentions of PISAgro and is open to collaboration with anyone as long as the intention is sincere to develop plantations and complies with regulations. Collaboration or synergy is carried out with the aim of advancing, independent and modern plantations.

On this occasion, Andi Nur said that, "There is a need for plantation business partnerships to help smallholders improve the quality of their production and productivity, from upstream to downstream," he said.

Andi Nur added, As stated in Law Number 39 of 2014 concerning Plantations in article 57 regarding Plantation Business Partnerships. To empower Plantation Businesses, Plantation Companies enter into plantation business partnerships that are mutually beneficial, mutually respectful, mutually responsible, and mutually reinforcing and interdependent with Planters, employees, and communities around the Plantations.

Presentation from Several Working Groups

On this occasion, several working groups, including oil palm, explained the challenges faced, the implementation of an inclusive partnership model, and the importance of multistakeholder partnerships in efforts to develop plantation productivity.

One of the representatives of Palm Oil, Mr. R. Azis Hidayat, explained that the integration of the People's Palm Oil Rejuvenation program with related institutions such as ISPO, is very important, in which this integration is able to assist in the negotiation process of traceability of palm oil products to the United States and the European Union. "WG Palm Oil is collaborating with various institutions, including the Ministry of Foreign Affairs, to encourage the acceleration of PSR and ISPO," he said.

In addition, he added that WG Palm Oil has a closed-loop strategic partnership model, in which the program has been implemented in Riau, in collaboration with BRI which poured Rp1.756 trillion for the program.

From the Cocoa Working Group, Mr. Danang, a representative from WG Cocoa, confirmed the challenges presented by the Directorate General of Plantation on cocoa plantations in Indonesia. "Seeds are the main key in the development of the cocoa industry, considering that of the 1.4 million hectares of cocoa land in Indonesia, 1 million hectares (800 million trees) of them require rejuvenation," he said.

In addition, he added that it would take 300 years to solve problems in cocoa plantations if they were still using business-as-usual. Therefore, the Multistakeholder Partnership is the main key to solving this problem

Plantation Business Partnership

Plantation Business Partnerships can be in the form of cooperation patterns such as the provision of production, production, processing & marketing facilities, share ownership, and other supporting services.

He explained, In order to increase the capability of planters, the Directorate General of Plantations had collaborated with PT Nestle Indonesia some time ago, in terms of developing human resources, especially for coffee planters through the Coffee Growers Corporation Program, which included technical guidance on knowledge of coffee plant cultivation starting from upstream (cultivation).) to downstream (processing and marketing), escorting and assisting coffee plant cultivation for smallholders, as well as utilization of management and institutional processing technology for smallholder corporations.

"Hopefully with synergy and collaboration through plantation business partnerships it can help maximize farmers' income, and be mutually beneficial.

Anggota-anggota PISAgro - PISAgro Members



Mitra-mitra PISAgro - PISAgro Partners

